

6.000 PAKET SEMBAKO MURAH DIGELONTORKAN TEKAN INFLASI DI KOTIM



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bekerja sama dengan Bulog Kantor Wilayah Kalteng menggelontorkan 6.000 paket sembako murah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk pengendalian inflasi jelang pergantian tahun.

“Pasar murah yang merupakan program Pemprov Kalteng melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) bersama Bulog Kanwil Kalteng, kebetulan hari ini jadwal penyalurannya di Sampit,” kata Asisten Manajer Bisnis Bulog Sub Divisi Regional Sampit Agung di Sampit, Rabu.

Program pasar murah dari Pemprov dan Bulog Kanwil Kalteng ini ditindaklanjuti oleh Pemkab Kotim bersama Bulog Sub Divisi Regional Sampit. Kegiatan digelar sejak Minggu (10/11) di Masjid Al Falah Sampit dan dilanjutkan pada Rabu (13/11) di halaman Kantor Bulog Sampit.

Rencananya pasar murah masih akan digelar sampai Jumat (15/11), selama persediaan paket sembako masih ada.

Agung menjelaskan, program pasar murah kali ini dalam rangka menyambut pergantian tahun. Sebab, biasanya pada akhir hingga awal tahun berikutnya harga bahan pokok, terutama beras cenderung mengalami lonjakan harga yang berdampak pada inflasi.

“Kondisi itu dikarenakan musim panen beras lokal biasanya hanya sampai Oktober, jadi pada November, Desember, Januari dan Februari harga beras akan melambung. Makanya untuk mengantisipasi itu diselenggarakan kegiatan pasar murah dengan subsidi,” jelasnya.

Agung melanjutkan, paket sembako yang disediakan melalui pasar murah ini berisi 10 kilogram beras jenis premium, satu liter minyak goreng dan 1 kilogram gula pasir. Dengan isi paket tersebut harga normal atau harga pasarnya diperkirakan Rp200 ribu lebih.

Melalui pasar murah ini warga cukup menebus paket sembako itu dengan Rp20 ribu saja, sebab pemerintah telah memberikan subsidi Rp180 ribu untuk setiap paketnya.

Sejauh ini sekitar 4.000 paket sembako murah telah terjual, Bulog siap untuk menambah jumlah paket tersebut jika ada kontrak baru dengan Pemprov Kalteng.

Penjualan paket sembako murah menggunakan sistem kupon, sehingga hanya warga yang memiliki kupon yang bisa menebus paket tersebut. Pembagian kupon dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kelurahan dan desa setempat.

“Kami di Bulog sifatnya hanya menyiapkan barang sesuai pesanan, kemudian melayani distribusi saja. Kalau masalah pembagian kupon dan siapa saja sasarannya merupakan kewenangan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Salah seorang warga bernama Diana mengaku sangat senang dengan diadakan pasar murah oleh pemerintah. Terlebih dengan isi paket sembako itu, ia hanya perlu membayar sekitar 10 persen dari harga pasaran.

“Harganya murah banget, makanya walaupun saya tinggal di ujung Sampit saya bela-belain datang. Kalau di pasar sembako seperti ini harganya di atas Rp200 ribu, sedangkan di sini cuma Rp20 ribu,” sebutnya.

Ibu rumah tangga ini pun berharap pemerintah daerah lebih sering menggelar pasar murah, sebab dinilai sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarganya yang hanya bergantung dari penghasilan sang suami sebagai pekerja serabutan.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/728785/6000-paket-sembako-murah-digelontorkan-tekan-inflasi-di-kotim>, Rabu, 13 November 2024.
2. <https://prokalteng.jawapos.com/pemerintahan/pemprov-kalteng/11/11/2024/pasar-murah-6000-paket-sembako-disalurkan-untuk-kendalikan-inflasi/>, Senin, 11 November 2024

Catatan:

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu melaksanakan operasi pasar dan /atau pasar murah. Paket sembako murah sering kali merupakan bagian dari program bantuan sosial di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu

dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.